

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keragaman etnis dan budaya. Namun pasca runtuhnya Orde Baru dan bergulirnya era reformasi, benih-benih perpecahan etnis di daerah mulai menyeruak dengan berlatarkan konflik kepentingan. Seiring diberlakukannya Otonomi Daerah, yang mengharuskan setiap daerah mengupayakan pemberdayaan daerah masing-masing, berdampak pada kesenjangan potensi daerah yang kemudian menjadi persoalan krusial yang kerap menyulut konflik kepentingan.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah merupakan sebuah konteks pelaksanaan demokrasi dalam rangka mencari pemimpin atau kepala daerah yang sah. Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Otonomi Daerah) Pasal 56 jo Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang membuka peluang seluas-luasnya kepada rakyat untuk mewujudkan aspirasi daerah dengan memiliki pemimpin lokal yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah secara langsung. Pemilihan kepala daerah merupakan perjalanan politik panjang yang diwarnai tarik menarik antara kepentingan elit dan kehendak publik, kepentingan pusat dan daerah, atau bahkan antara kepentingan nasional dan internasional. Dalam setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah, dari tahap awal hingga akhir, mulai saat pasangan

kandidat melakukan deklarasi, pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, penetapan calon, pengumuman harta kekayaan, pengambilan nomor urut, kampanye, pemaparan visi-misi, debat kandidat, minggu tenang hingga hari pencoblosan selalu saja ada dinamika yang berkembang, seperti isu suku, agama dan politisasi agama, kampanye negatif, kisruh daftar pemilih tetap.

Di Indonesia politik identitas lebih terkait dengan masalah etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili pada umumnya oleh para elit dengan artikulasinya masing-masing.

Dapat dipahami pertumbuhan masyarakat di suatu tempat menggambarkan bahwa semakin kompleksnya masyarakat, di satu sisi juga memperlihatkan adanya persaingan yang semakin ketat dari yang lainnya, kebutuhan yang semakin banyak jumlah ragamnya telah meningkatkan keperluan dan kesabaran berorganisasi masyarakat Indonesia.

Kota Pematang Siantar merupakan kota yang dikelilingi Kabupaten Simalungun. Wilayah Kota Pematang Siantar terbagi menjadi 6 kecamatan yaitu: Kecamatan Siantar Barat, Kecamatan Siantar Marihat, Kecamatan Siantar Martoba, Kecamatan Siantar Selatan, Kecamatan Siantar Timur, Kecamatan Siantar Utara.

Kelompok Umur / <i>Age Group</i>	Laki-laki / <i>Male</i>	Perempuan / <i>Female</i>	Rasio Jenis Kelamin/ <i>Sex Ratio</i>	Jumlah / <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0-4	11 668	11 400	102,35	23 068
5-9	11 945	11 553	103,39	23 498
10-14	11 567	11 303	102,34	22 870
15-19	13 057	13 246	98,57	26 303
20-24	10 082	11 157	90,36	21 239
25-29	8 977	8 891	100,97	17 868
30-34	8 450	8 643	97,77	17 093
35-39	8 281	8 661	95,61	16 942
40-44	8 115	8 809	92,12	16 924
45-49	7 497	7 988	93,85	15 485
50-54	6 550	7 345	89,18	13 895
55-59	5 343	5 923	90,21	11 266
60-64	3 994	4 330	92,24	8 324
65-69	2 333	2 958	78,87	5 291
70+	2 738	4 607	59,43	7 345
Jumlah / <i>Total</i>	120 597	126 814	95,10	247 411

Penduduk asli kota Pematang Siantar adalah batak Simalungun, sekitar 60% dari jumlah penduduk Kota Pematangsiantar, yang sisanya di penuhi suku lain nyaselain suku batak ada juga suku melayunya. Tetapi karena banyak nya pergolakan kependudukan di Kota Pematangsiantar, sehingga batak Simalungun tidak menjadi dominan sebagai yang berkuasa di Kota Pematangsiantar. Suku Batak lain pun sangat mendominasi, contoh nya bahasa permersatu suku batak sehari hari yang di pakai adalah bahasa batak Toba, kecuali bahasa Indonesia.

Berbagai macam suku atau golongan berada di Pematangsiantar yang terdiri dari suku Jawa, Batak (toba, simalungun, karo, mandailing, pak-pak), Tionghoa,

Nias, Melayu. Banyaknya suku di kota ini mayoritas adalah Suku Batak Toba. Memang dahulu kota ini dipenuhi oleh suku Batak Simalungun namun seiring berjalannya waktu terjadi perkembangan suku Batak Toba. Perkembangan suku Batak Toba mempengaruhi pemikiran dalam berpolitik. Sebagai contoh bahwa suku Batak Toba dalam memilih calon walikota di pematang siantar masih mengutamakan golongannya menjadi seorang pemimpin. Ada pun calon-calon pada Pemilihan Walikota tahun 2016 adalah:

1. Sujito Dan Djumadi (Sujud)
2. Hulman Sitorus dan Hefriansyah (Manis)
3. Teddy Robinson Siahaan dan Zainal Purba (TRS-Zainal)
4. Wesly Silalahi dan Sailanto (Westo)

Dilihat dari suku calon bahwa yang mendominasi adalah yg bersuku batak toba dengan marganya yang khas. Politik identitas etnis batak toba yang terjadi di kota Pematang Siantar Calon Walikota pada tahun 2016 Hulman Sitorus yang merupakan calon terkuat bersuku Batak Toba. Beliau saat itu telah memenangkan pemilihan dengan suara terbanyak dan melanjutkan periode ke-2. Namun sangat menyedihkan beliau tak sempat menyelesaikan periode ke-2nya. Beliau meninggal karena sakit.

Dalam konstelasi politik di kota PematangSiantar terkadang muncul permasalahan dalam interaksi antar etnis, apalagi menyangkut aspek kepemimpinan, perebutan kekuasaan, yang merupakan sifat egois masing-masing identitas etnis. Dalam kontek demokrasi lokal seperti pemilihan kepala daerah untuk pemilihan walikota yang dilaksanakan di daerah, maka pemilih lebih cenderung memilih kandidat yang berasal dari etnis yang sama artinya etnis dari

kandidat yang ada akan mempengaruhi pilihan pemilih. Slogan yang sering didengungkan seperti putra daerah menjadi isu yang sering mewarnai kampanye para kandidat. Dalam menggalang solidaritas etnis dalam pemilihan kepala daerah, peranan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama serta organisasi sosial masyarakat sangat signifikan perannya sebagai suatu gerakan kepentingan politik mereka, simbol simbol dan berbagai atribut etnis dijadikan obyek kepentingan politik. Permasalahan yang sering terjadi adalah masyarakat dalam menentukan pilihan bukan atas wawasan yang luas lebih kepada wawasan yang bersifat primordial. Masyarakat kota Pematang Siantar yang masih memiliki pemahaman begitu pastilah suatu saat jadi permasalahan yang besar.

Berdasarkan permasalahan itulah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Politik Identitas Etnis Batak Toba Pada Pemilihan Walikota Pematang Siantar Tahun 2016”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah kepada pokok permasalahan, maka dilakukan pembatasan terhadap permasalahan yang diteliti dari uraian latar belakang sebelumnya. Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Kuatnya politik identitas etnis Batak Toba pada pemilihan Walikota Pematang Siantar Tahun 2016.”

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian yang sangat penting dari masalah yang akan diteliti. Karena rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan

dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Maka dari penjelasan diatas rumusan masalah dalam hasil penelitian ini adalah “Bagaimana politik identitas etnis Batak Toba pada pemilihan Walikota Pematang Siantar Tahun 2016?

D. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memiliki tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui: “Untuk mengetahui politik identitas etnis Batak Toba pada pemilihan Walikota Pematang Siantar Tahun 2016.”

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dilakukan yaitu:

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan sebagai masukan agar pemerintah lebih memperhatikan partisipasi masyarakat dalam memilih diluar etnis
2. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa khususnya Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial.
3. Bagi masyarakat supaya lebih berpartisipasi dalam pemilihan tanpa memandang etnis.